

PENGARUH BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

IMAN AKHADI

STIE TRISAKTI JAKARTA
iman.akh@gmail.com

Received: January 2, 2024; Revised: January 10, 2024; Accepted: January 11, 2024

Abstract: *This research was conducted on the topic of the Influence of Regional Transfer and Village Fund Expenditure as government spending instruments in the state budget on Development Inequality in Indonesia. The study utilized Regional Transfer and Village Fund Expenditure (TKDD) data as the independent variable. Meanwhile, the dependent variables were the Regional Disparity Index (Williamson Index) and the Gini Ratio as representations of regional inequality in Indonesia. The data used consisted of panel data, including TKDD expenditure, per capita GRDP, and the population of each province in Indonesia from 2017 to 2021. The research employed a quantitative method using panel data regression analysis (Pooled data). Based on the LM Test results, the Random Effect Model was found to be better than the Common Effect Model for estimating the regression model between TKDD and the Williamson Index (IW) variables. Meanwhile, the best model for estimating the regression model between TKDD and the Gini Index (IG) variables was the Fixed Effect Model after conducting the Chow Test and Hausman Test. Regression testing results indicated that the TKDD variable had a negative and non-significant relationship with the IW variable (development inequality). This is evident from the coefficient value of -0.101798 and a probability value of 0.6012 (greater than 0.05), meaning it is not significant. Similarly, the regression results between the TKDD variable and the IG variable showed a coefficient value of -16477.71 and a probability value of 0.1410 (greater than 0.05), indicating non-significance.*

Keywords: *Development Inequality, Regional Inequality, State Budget*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan mengambil topik tentang Pengaruh Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai instrumen belanja pemerintah dalam APBN terhadap Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Anggaran Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah Indeks Ketimpangan Wilayah (*Indeks Williamson*) dan Rasio Gini sebagai representasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel berupa Belanja TKDD, PDRB per kapita dan jumlah penduduk setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel (Pooled data). Berdasarkan hasil Uji LM, Model Random Effect lebih baik dibandingkan dengan model Common Effect untuk mengestimasi model regresi antara variabel TKDD dengan variabel Indeks Williamson (IW). Sedangkan model terbaik untuk mengestimasi model regresi antara variabel TKDD dengan variabel Indeks Gini (IG) adalah model *Fixed Effect* setelah dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel TKDD memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap variabel IW (ketimpangan pembangunan). Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien sebesar -0.101798 dan nilai probabilitas 0.6012 (lebih besar dari 0.05) yang berarti tidak signifikan. Sedangkan hasil regresi antara variabel TKDD dengan variabel IG menunjukkan hasil nilai koefisien sebesar -16477,71 dan nilai probabilitas 0,1410 (lebih besar dari 0.05) yang berarti tidak signifikan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Ketimpangan Pendapatan, TKDD

PENDAHULUAN

Permasalahan ketimpangan pembangunan merupakan masalah klasik di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, jumlah penduduk dan infrastruktur merupakan beberapa sebab munculnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wilayah Pulau Jawa bagian utara lebih maju/berkembang dibandingkan dengan Pulau Jawa bagian selatan. Pembangunan Indonesia Bagian Barat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia Bagian Timur. Wilayah Pulau Sumatera Bagian Timur lebih maju/berkembang dibandingkan dengan Pulau Sumatera Bagian Barat. Ini adalah contoh bentuk ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Isu ketimpangan pembangunan juga berhubungan dengan isu pemerataan pembangunan. Bappenas memasukkan masalah ketimpangan ekonomi sebagai bagian dari Pilar ke 2 dalam membuat Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, yaitu tentang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan ([Bappenas, 2023b](#)). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan diantaranya adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dalam menyusun RAPBN. Belanja transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Belanja transfer ke daerah adalah mekanisme keuangan yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mendorong pemberdayaan daerah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas belanja transfer ini dalam mengatasi ketimpangan pembangunan regional di Indonesia.

Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, termasuk perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur,

layanan publik, peluang ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Dalam konteks ini, belanja transfer dapat menjadi alat penting untuk mengurangi disparitas tersebut. Pengaruh belanja transfer terhadap ketimpangan pembangunan regional dapat dinilai dari berbagai sudut, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana dana-dana tersebut telah berhasil mengurangi kesenjangan antarwilayah atau justru memunculkan tantangan baru.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, jumlah Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 816,232 Trilyun, naik sebesar Rp 30,622 Trilyun dari tahun 2021 sebesar Rp 785,61 Trilyun. Jumlah tersebut merupakan 30% dari total pengeluaran negara tahun 2022 sebesar Rp 2.714 Trilyun ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)). Nilai Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tersebut akan semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Apalagi ada tuntutan dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) untuk meminta dana tambahan 10% dari APBN ([Tvonenews.com, 2023](#)).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil topik tentang Pengaruh Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai instrumen belanja pemerintah dalam APBN terhadap Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam mengalokasikan sumber dayanya melalui kebijakan fiskal sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah dapat berjalan dengan optimal.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Permasalahan ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Baik negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang menghadapi masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam negaranya. Apalagi posisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau serta jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, menjadikan masalah ketimpangan pembangunan sebagai tantangan bagi Pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berdampak terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh ([Muchaqqi, Halkis and Mundayat, 2019](#)) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi berdampak negatif pada sishankamrata pada dua dimensi, yaitu pelemahan dan ancaman. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas politik yang kokoh, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi seperti kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan serta pembangunan infrastruktur yang inklusif.

Prof Dr Muhammad Firdaus dalam Orasi Ilmiah Guru Besar IPB menyatakan bahwa permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dihadapi Indonesia semakin serius. Saat ini Indonesia menempati posisi terburuk dibandingkan dengan negara maju dan sesama negara sedang berkembang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan ini ([Firdaus, 2013](#)). Penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution menunjukkan bahwa belanja pemerintah

memiliki hubungan positif dengan ketimpangan, yang berarti bahwa semakin bertambah belanja pemerintah, makin meningkat pula ketimpangan pembangunan ([Nasution, 2020](#)).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh ([Acconcia and Monte, 1999](#)) di Italia menyebutkan bahwa alokasi dana publik antar daerah melalui anggaran negara merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengatasi disparitas daerah. Di negara maju, dampak dari kebijakan redistribusi dan transfer adalah bahwa daerah yang berpenghasilan rendah akan memperoleh dana publik yang lebih besar dari negara untuk menstimulasi aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran publik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Malaysia dilakukan oleh Mukaramah-Harun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik pemerintah untuk pendidikan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antar etnis dan ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan perdesaan. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan pedesaan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis dan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan antara perkotaan dan perdesaan. ([Mukaramah-Harun, Zakariah and Azali, 2012](#)).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah Indeks Ketimpangan Wilayah dan Rasio Gini sebagai representasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel berupa Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PDRB per kapita dan jumlah penduduk setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021.

Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pemerintah setiap tahun dalam RAPBN mengalokasikan dana untuk Belanja Transfer ke

Daerah dan Dana Desa. Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa secara umum terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik);
- b. Dana Insentif Daerah (DID);
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta);
- d. Dana Desa.

Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*). DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah. (Rodani, 2023).

Kegiatan Belanja Transfer ke Daerah ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja yang produktif. Sedangkan Dana Desa mulai ada sejak tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dimana Pemerintah Pusat selain melakukan Program Transfer ke Daerah juga memberikan Dana Desa yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Kemenkeu, 2015).

Indeks Ketimpangan Antar Wilayah

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar provinsi, digunakan Indeks Williamson. Williamson (1966) dalam Sjafrizal (2014) menguji kebenaran Teori Pertumbuhan Neo-Klasik dengan mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan nilai Indeks Williamson (Nasution, 2020). Dalam

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik yang dibuat oleh Douglas C. North diungkapkan bahwa pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Penghitungan Indeks Williamson ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \frac{\sqrt{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{y}$$

Dimana:

y_i = PDRB per kapita provinsi i

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata nasional

f_i = Jumlah penduduk di provinsi i

n = Jumlah penduduk nasional

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah dengan besaran nilai berkisar antara 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson adalah jika nilai IW menjauhi angka 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil. (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Rasio Gini

Rasio Gini, Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna,

sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Indeks Gini digunakan untuk membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Gini (IG)} = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Dimana:

F_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Indeks Gini adalah sebagai berikut: (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

- Indeks Gini < 0,4: tingkat ketimpangan rendah;
- 0,4 < Indeks Gini < 0,5: tingkat ketimpangan sedang;
- Indeks Gini > 0,5: tingkat ketimpangan tinggi.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengaruh Belanja TKDD Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Propinsi (Indeks Williamson) Di Indonesia.

Tujuan dari Program Belanja TKDD salah satunya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mendanai kebutuhan anggaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Program kegiatan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga diharapkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang terbatas, dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Acconcia and Monte, 1999) menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi anggaran oleh pemerintah pusat ke daerah merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengatasi ketimpangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2020) menunjukkan bahwa belanja pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar anggaran belanja pemerintah maka ketimpangan antar wilayah akan semakin besar pula. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan belanja pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mukaramah-Harun, Zakariah and Azali, 2012) menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan pedesaan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis dan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan antara perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Program Belanja TKDD memiliki hubungan negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Indeks Williamson) di Indonesia.

- Pengaruh Belanja TKDD Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan selain diukur berdasarkan Indeks Williamson, dapat diukur berdasarkan Indeks Gini/Rasio Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Nilai indeks gini merupakan alat ukur untuk melihat bagaimana pendapatan atau kekayaan dalam perekonomian tersebar di antara penduduk di suatu wilayah. BPS setiap tahun dalam laporannya mengeluarkan Indeks Gini setiap provinsi di Indonesia. Nilai Indeks Gini setiap provinsi di Indonesia dapat dijadikan

sebagai alat ukur untuk menilai apakah program belanja TKDD yang disalurkan kepada daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap pemerataan pendapatan. Saat ini Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang masih digunakan oleh mayoritas negara-negara di dunia untuk merepresentasikan distribusi hasil-hasil pembangunan. (Riani, 2016).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Program Belanja TKDD memiliki hubungan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel (*Pooled data*). Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang meliputi data deret waktu (*time series*) selama periode 2017-2021 dan data *cross section* yaitu data Realisasi TKDD yang ditransfer ke 34 provinsi di Indonesia sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah data ketimpangan pembangunan di Indonesia yang direpresentasikan melalui data Indeks Williamson dan data Indeks Gini pada 34 provinsi di Indonesia.

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. (Widaryono, 2017).

Model *Common Effect*, merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, yang dilakukan dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu, serta mengabaikan perbedaan dimensi individu ataupun waktu.

Model *Fixed Effect*, merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda,

sedangkan *slope* antar individu adalah tetap (sama). Pendekatan ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu. Model *Fixed Effect* ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu.

Model *Random Effect*, mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel *random* atau stokastik. Dengan dimasukkannya variabel *dummy* di dalam model *Fixed Effect* akan membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) atau yang dikenal sebagai metode *random effects*. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara *random* dan merupakan wakil populasi. Pendekatan ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.

Untuk menganalisis pengaruh Program Belanja TKDD terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut:

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 TKDD_{it} + \mu_{it}$$

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 TKDD_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

IG : Indeks Gini

TKDD : Program Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi

i : Provinsi di Indonesia

t : Tahun (2017-2021)

μ : Faktor Pengganggu

Untuk menghitung nilai Indeks Williamson, digunakan data PDRB perkapita setiap provinsi di Indonesia, rata-rata PDRB di Indonesia, jumlah penduduk tiap provinsi dan jumlah penduduk Indonesia selama tahun 2017-

2021. Sedangkan nilai Indeks Gini menggunakan data Indeks Gini yang diterbitkan oleh BPS selama tahun 2017-2021. Data Realisasi TKDD setiap provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI selama tahun 2017-2021.

Untuk memilih model manakah yang terbaik digunakan dalam mengestimasi data panel, terdapat tiga uji yang dapat digunakan ([Widaryono, 2017](#)), yaitu:

Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* (menggunakan *dummy*), lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau metode *Common Effect*. Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Common Effect Model} \\ H_1 & : \text{Fixed Effect Model} \end{aligned}$$

Apabila F statistik > F Tabel dan nilai probabilitas signifikan, maka H_0 ditolak. Sehingga model regresi yang terbaik menggunakan metode *Fixed Effect*. Demikian pula sebaliknya. Uji F statistik disini merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana dilakukan melalui Uji Chow. Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel *dummy* dengan *residual sum of square* (RSS) atau *Common Effect*.

Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien

sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Random Effect Model} \\ H_1 & : \text{Fixed Effect Model} \end{aligned}$$

Apabila *Chi-Square* Statistik > *Chi-Square* (X₂) Tabel dan nilai probabilitas signifikan pada α tertentu, maka H_0 ditolak sehingga model yang terbaik adalah *Fixed Effect*. Demikian pula sebaliknya.

Uji Lagrange Multiplier

Menurut [Widaryono \(2017\)](#), untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect* digunakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji LM ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degre of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 & : \text{Common Effect Model} \\ H_1 & : \text{Random Effect Model} \end{aligned}$$

Apabila *Chi-Square* Statistik > *Chi-Square* (X₂) Tabel dan nilai probabilitas signifikan maka H_0 ditolak, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* daripada model *Common Effect*. Demikian pula sebaliknya ([Istiqamah, Syaparuddin and Rahmadi, 2018](#)).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI melalui APBN, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI selama periode 2017-2021 dapat digambarkan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN tahun 2017-2021

No	Provinsi	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Milyar Rupiah) *)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DI Aceh	35.225,99	34.317,29	35.944,34	33.667,67	33.858,49
2	Sumatera Utara	40.320,51	40.233,62	42.055,66	39.643,83	41.152,45
3	Sumatera Barat	20.043,08	20.150,61	21.488,57	19.926,43	20.057,42
4	Riau	21.394,54	21.954,97	24.904,92	22.350,59	24.249,98
5	Kep Riau	7.598,29	7.999,30	9.272,78	8.445,83	8.216,73
6	Jambi	13.712,06	13.894,78	15.095,75	13.887,82	14.257,75
7	Sumatera Selatan	27.713,65	28.925,17	32.013,73	28.942,41	29.691,70
8	Bangka Belitung	6.379,78	6.763,96	7.317,36	6.575,50	6.963,56
9	Bengkulu	9.971,70	9.711,68	10.620,72	10.039,11	10.112,02
10	Lampung	21.835,02	22.040,23	22.254,94	21.217,58	21.372,44
11	DKI Jakarta	18.989,98	17.855,18	15.420,53	17.357,95	23.191,46
12	Jawa Barat	64.734,65	65.053,87	69.239,83	67.585,24	70.218,88
13	Banten	15.297,81	15.469,69	16.438,78	16.158,34	16.794,00
14	Jawa Tengah	64.437,43	64.187,94	67.987,48	65.595,43	66.289,48
15	DI Yogyakarta	9.562,99	9.414,68	10.361,75	10.153,11	10.182,27
16	Jawa Timur	72.012,33	75.833,18	79.341,35	74.631,84	78.833,18
17	Kalimantan Barat	19.472,17	19.295,41	20.338,01	18.807,88	20.188,03
18	Kalimantan Tengah	16.379,84	16.743,47	17.572,08	16.647,03	17.487,21
19	Kalimantan Selatan	15.796,00	17.296,82	20.291,32	18.178,75	17.115,82
20	Kalimantan Timur	17.336,48	21.236,59	26.872,81	23.953,61	21.239,79
21	Kalimantan Utara	6.022,67	6.329,70	6.897,09	6.704,68	6.989,40
22	Sulawesi Utara	13.917,81	13.790,56	14.137,55	13.417,62	13.736,00
23	Gorontalo	6.065,78	6.378,65	6.667,61	6.308,89	6.288,23
24	Sulawesi Tengah	15.410,86	15.563,47	16.835,03	16.224,10	16.814,99
25	Sulawesi Selatan	29.942,25	30.604,77	31.546,07	29.719,72	30.356,43
26	Sulawesi Barat	6.565,21	6.565,01	7.158,85	6.687,04	6.538,18
27	Sulawesi Tenggara	15.264,78	15.264,78	17.189,98	16.549,35	17.898,87
28	Bali	11.202,54	11.141,25	11.611,68	11.306,90	11.597,43
29	Nusa Tenggara Barat	15.307,14	15.177,19	16.031,46	14.886,50	15.291,15
30	Nusa Tenggara Timur	21.723,83	22.280,60	24.019,13	22.692,22	22.667,63
31	Maluku	12.232,27	12.270,52	12.724,58	11.811,65	2.484,17
32	Maluku Utara	9.592,25	10.027,45	10.769,98	10.235,98	10.923,71
33	Papua Barat	17.844,00	18.100,67	23.834,59	19.584,62	17.855,24
34	Papua	41.994,56	44.973,43	47.003,07	42.617,09	44.806,66
Jumlah		741.300,25	757.487,58	811.259,38	762.512,31	785.610,77

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah Anggaran Belanja TKDD dalam APBN selama periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan karena efek dari pandemi Covid-19. Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah Anggaran Belanja TKDD antar provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan jumlah nilai tertinggi pada tahun 2021 adalah Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat memiliki jumlah yang lebih rendah.

Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dalam jumlah Anggaran TKDD dari tahun 2017 hingga 2019, meskipun mengalami kenaikan anggaran TKDD yang cukup signifikan

pada tahun 2021. Data pada tabel 1 menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam Anggaran Belanja TKDD diantara provinsi-provinsi di Indonesia. Pertumbuhan anggaran TKDD ini dapat mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mendukung pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Data PDRB perkapita serta jumlah penduduk setiap kota/kabupaten di 34 propinsi, dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan Indeks Williamson untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pembangunan antar propinsi di Indonesia. Hasil perhitungan Indeks Williamson untuk setiap propinsi selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Indeks Williamson setiap Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021

No	Provinsi	Indeks Williamson *)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DI Aceh	0,3609	0,3557	0,3514	0,3655	0,3761
2	Sumatera Utara	0,5656	0,5705	0,5765	0,5497	0,5565
3	Sumatera Barat	0,2613	0,2638	0,2661	0,3014	0,3052
4	Riau	0,3687	0,3503	0,3302	0,2965	0,2835
5	Kep Riau	0,4757	0,4514	0,4448	0,3672	0,3944
6	Jambi	0,4646	0,4680	0,4624	0,4680	0,4498
7	Sumatera Selatan	0,7091	0,7159	0,7175	0,7344	0,7382
8	Bangka Belitung	0,1962	0,1991	0,2140	0,2000	0,1862
9	Bengkulu	0,4051	0,4042	0,4288	0,4223	0,4234
10	Lampung	0,2626	0,2638	0,2644	0,2392	0,2379
11	DKI Jakarta	0,5104	0,5122	0,5202	0,4916	0,4839
12	Jawa Barat	0,6999	0,6998	0,6916	0,6741	0,7329
13	Banten	0,6274	0,6283	0,6275	0,6299	0,6342
14	Jawa Tengah	0,6450	0,6379	0,6312	0,6559	0,6547
15	DI Yogyakarta	0,4822	0,4775	0,4725	0,4712	0,4716
16	Jawa Timur	0,9613	0,9660	0,9720	0,9741	0,9820
17	Kalimantan Barat	0,2712	0,2697	0,2688	0,2761	0,2787
18	Kalimantan Tengah	0,1949	0,1919	0,1937	0,2156	0,2180
19	Kalimantan Selatan	0,4361	0,4284	0,4217	0,4247	0,4214
20	Kalimantan Timur	0,5127	0,4820	0,4816	0,4646	0,4476
21	Kalimantan Utara	0,1769	0,1575	0,1472	0,1722	0,1683

22	Sulawesi Utara	0,4981	0,5028	0,5026	0,4893	0,4978
23	Gorontalo	0,1484	0,1461	0,1437	0,1913	0,1936
24	Sulawesi Tengah	0,5378	0,9115	1,0007	1,1118	1,2360
25	Sulawesi Selatan	0,6811	0,6919	0,7080	0,7725	0,7704
26	Sulawesi Barat	0,3590	0,3511	0,3426	0,3320	0,3329
27	Sulawesi Tenggara	0,6220	0,6142	0,6115	0,5859	0,4874
28	Bali	0,2687	0,2664	0,2604	0,3649	0,3497
29	Nusa Tenggara Barat	0,8001	0,5964	0,5699	0,7125	0,6980
30	Nusa Tenggara Timur	0,6580	0,6635	0,6631	0,6294	0,6273
31	Maluku	0,2594	0,2507	0,2426	0,4337	0,4429
32	Maluku Utara	0,2763	0,2758	0,2778	0,3546	0,5822
33	Papua Barat	1,4749	1,4711	1,4639	1,4983	1,4490
34	Papua	0,8287	0,8391	0,6767	0,7995	0,8178

Diolah bersumber dari data BPS

Tabel 2 memperlihatkan nilai Indeks Williamson setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Nilai Indeks mendekati angka 0 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah Kota/Kabupaten di Provinsi tersebut rendah. Sebaliknya jika nilai Indeks mendekati 1 atau lebih dari 1 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antar Kota/Kabupaten di Provinsi tersebut. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Provinsi Gorontalo memiliki nilai indeks Williamson paling rendah selama tahun 2017 sampai 2019 dengan nilai Indeks masing-masing sebesar 0.1484, 0.1461 dan 0.1437. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai Indeks terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai indeks 0.1722 dan 0.1683. Dengan demikian kedua provinsi tersebut jika

dibandingkan dengan 32 provinsi lain memiliki ketimpangan pendapatan antar Kota/Kabupaten paling rendah.

Sebaliknya provinsi dengan nilai indeks paling tinggi selama tahun 2017-2021 adalah Provinsi Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut terjadi ketimpangan pendapatan antar Kota/Kabupaten paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Nilai Indeks Gini (IG) yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021 untuk bulan September, berdasarkan data dari SIMREG (Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional) Bappenas adalah sebagai berikut ([Bappenas, 2023a](#)).

Tabel 3. Indeks Gini Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021

No	Provinsi	Indeks Gini (September)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DI Aceh	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323
2	Sumatera Utara	0,335	0,311	0,315	0,314	0,313
3	Sumatera Barat	0,312	0,305	0,307	0,301	0,300
4	Riau	0,325	0,347	0,331	0,321	0,327
5	Kep Riau	0,334	0,335	0,324	0,316	0,315
6	Jambi	0,365	0,341	0,339	0,338	0,340
7	Sumatera Selatan	0,349	0,355	0,329	0,323	0,321

8	Bangka Belitung	0,333	0,326	0,331	0,320	0,314
9	Bengkulu	0,276	0,272	0,262	0,257	0,247
10	Lampung	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339
11	DKI Jakarta	0,409	0,390	0,391	0,400	0,411
12	Jawa Barat	0,393	0,405	0,398	0,398	0,406
13	Banten	0,365	0,357	0,358	0,359	0,368
14	Jawa Tengah	0,440	0,422	0,428	0,437	0,436
15	DI Yogyakarta	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364
16	Jawa Timur	0,379	0,367	0,361	0,365	0,363
17	Kalimantan Barat	0,379	0,364	0,370	0,369	0,375
18	Kalimantan Tengah	0,378	0,391	0,374	0,386	0,384
19	Kalimantan Selatan	0,359	0,359	0,355	0,356	0,339
20	Kalimantan Timur	0,329	0,325	0,318	0,325	0,315
21	Kalimantan Utara	0,327	0,344	0,335	0,320	0,320
22	Sulawesi Utara	0,347	0,340	0,334	0,351	0,325
23	Gorontalo	0,333	0,340	0,335	0,335	0,331
24	Sulawesi Tengah	0,313	0,304	0,292	0,300	0,285
25	Sulawesi Selatan	0,394	0,372	0,376	0,368	0,359
26	Sulawesi Barat	0,345	0,317	0,330	0,321	0,326
27	Sulawesi Tenggara	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
28	Bali	0,404	0,392	0,393	0,388	0,394
29	Nusa Tenggara Barat	0,405	0,417	0,410	0,406	0,409
30	Nusa Tenggara Timur	0,339	0,366	0,365	0,356	0,366
31	Maluku	0,321	0,326	0,320	0,326	0,316
32	Maluku Utara	0,330	0,336	0,310	0,290	0,278
33	Papua Barat	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374
34	Papua	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396

Sumber: SIMREG Bappenas RI

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa Nilai IG di setiap provinsi cukup bervariasi. Nilai IG dibawah 0,5 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut rendah, sebaliknya jika nilai IG diatas 0,5 dikategorikan ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut tinggi. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 memiliki nilai IG tertinggi 0.436, sedangkan provinsi dengan nilai IG terendah tahun 2021 adalah Provinsi Bengkulu dengan nilai 0.247.

Pengaruh Program Belanja TKDD Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Indeks Williamson) di Indonesia

Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow model pengaruh program belanja TKDD terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi (Indeks Williamson) di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F (Uji Chow) Model Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Indonesia

Test Cross-section Fixed Effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	773.318036	(33,134)	0.0000
Cross-section Chi-square	888.026607	33	0.0000

Uji Hausman

Hasil uji Hausman terhadap model pengaruh program belanja TKDD terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi

(Indeks Williamson) di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hausman Model Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Indonesia

Test Cross-section Random Effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	0.769070	1	0.3805

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa *Chi Square* Statistik sebesar 0.769070 dengan probabilitas 0.3805 > 0.05 atau tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Oleh karena *Chi Square* statistik

tidak signifikan, sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa *Random Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) pada model pengaruh program belanja TKDD terhadap ketimpangan pembangunan antar

Provinsi (Indeks Williamson) di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No Effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	333.5628 (0.0000)	2.180227 (0.1398)	335.7430 (0.0000)
Honda	18.26370 (0.0000)	-1.476559 (0.9301)	11.87030 (0.0000)
King-Wu	18.26370 (0.0000)	-1.476559 (0.9301)	4.610605 (0.0000)
Standardized Honda	18.83105 (0.0000)	-1.297639 (0.9028)	8.656731 (0.0000)
Standardized King-Wu	18.83105 (0.0000)	-1.297639 (0.9028)	2.184592 (0.0145)
Gouriero ux et al.	-	-	333.5628 (0.0000)

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa hasil uji hipotesis Cross-section Breuch-Pagan sebesar 333.5628 dengan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga berdasarkan hasil Uji LM, dapat diambil kesimpulan bahwa *Random Effect*

Model lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Estimasi *Random Effect Model* pengaruh program belanja TKDD terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Random Effect Model Program Belanja TKDD Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	23398.24	1217.993	19.21049	0.0000
IW	-0.101798	0.194283	-0.523966	0.6012
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994859	Mean dependent var	22762.54	
Adjusted R-squared	0.993554	S.D. dependent var	17378.66	
S.E. of regression	1395.255	Akaike info criterion	17.50168	
Sum squared resid	2.61E+08	Schwaiz criterion	18.14989	
Log likelihood	-1443.892	Hannan-Quinn criter.	17.76474	
F-statistic	762.6355	Durbin-Watson stat	2.097815	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model persamaan regresi hubungan antara variabel TKDD terhadap variabel IW dari hasil uji statistik adalah sebagai berikut:

$$IW = 23398,24 - 0.101798TKDD + \mu_{it}$$

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat hasil regresi diperoleh t-statistik sebesar -0.523966 dengan probabilitas $0.6012 > 0.05$ atau tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Nilai koefisien regresi variabel indeks ketimpangan pembangunan (Indeks Williamson) diperoleh nilai sebesar -0.101798. Hasil ini menunjukkan bahwa program belanja TKDD yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN selama tahun 2017-2021 memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia. Hal ini

sekalius membuktikan bahwa program belanja TKDD yang dianggarkan dalam APBN belum memberikan dampak secara signifikan terhadap pemerataan pembangunan yang ditunjukkan melalui Indeks Williamson. Sehingga pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dari belanja TKDD yang dianggarkan dalam APBN.

Pengaruh Program Belanja TKDD Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia

Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow model pengaruh belanja TKDD terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia dapat terlihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F (Uji Chow) Model Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia

Test Cross-section Fixed Effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	674.445784	(33,134)	0.0000
Cross-section Chi-square	865.036920	33	0.0000

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa nilai F Statistik sebesar 674.445784 dengan probabilitas $0.000 < 0.05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa F Statistik signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan H_0 ditolak,

sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Uji Hausman untuk menguji pengaruh belanja TKDD terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di Indonesia dapat terlihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Hausman Model Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia

Test Cross-section Random Effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	7.435081	1	0.0064

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa *Chi-Square* Statistik sebesar 7.435081 dengan probabilitas $0.0064 < 0.05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$. Oleh karena *Chi Square* statistik signifikan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect*

Model. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik dalam mengestimasi model ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia adalah *Fixed Effect Model*.

Estimasi *Fixed Effect Model* ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Estimasi Fixed Model Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	28554.51	3913.071	7.297210	0.0000
IW	-16477.71	11128.27	-1.480708	0.1410
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994931	Mean dependent var		22762.54
Adjusted R-squared	0.993645	S.D. dependent var		17378.66
S.E. of regression	1395.396	Akaike info criterion		17.48750
Sum squared resid	2.57E+08	Schwaiz criterion		18.13571
Log likelihood	-1442.694	Hannan-Quinn criter.		17.75056
F-statistic	773.5852	Durbin-Watson stat		2.138804
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model persamaan regresi sebagai hasil dari uji statistik hubungan antara variabel TKDD terhadap variabel IG adalah sebagai berikut:

$$IG = 28554,51 - 16477,71 + \mu_{it}$$

Berdasarkan tabel 10 terlihat hasil regresi diperoleh t-statistik sebesar -1,480708 dengan probabilitas $0.1410 > 0.05$ atau tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa program belanja TKDD yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN selama tahun 2017-2021 memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa program belanja TKDD yang dianggarkan dalam APBN belum memberikan dampak secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui Indeks Gini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) setiap tahun mengalami kenaikan. Selama tahun 2017-2021, proporsi anggaran TKDD mencapai lebih dari 30% dari total anggaran belanja dalam APBN. Besarnya anggaran tersebut akan sangat disayangkan jika penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan tujuannya. Salah satu tujuan dari belanja transfer dana ke daerah adalah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Berdasarkan hasil pengujian atas data panel berupa data TKDD, Indeks Williamson dan Indeks Gini di Indonesia selama periode 2017-2021, model regresi data panel untuk menguji pengaruh TKDD terhadap ketimpangan

pembangunan (Indeks Williamson) yang terbaik menggunakan *Random Effect Model*. Dari hasil uji statistik diperoleh hasil bahwa variabel anggaran belanja TKDD memiliki hubungan negatif dengan variabel IW yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.101798. Nilai probabilitas diketahui sebesar 0.6012 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak signifikan.

Sedangkan model regresi data panel untuk menguji pengaruh TKDD terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang terbaik menggunakan *Fixed Effect Model*. Dari hasil uji statistik diperoleh hasil bahwa variabel anggaran belanja TKDD memiliki hubungan negatif dengan variabel IG yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -16477.71. Nilai probabilitas diketahui sebesar 0.1410 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program anggaran belanja TKDD dalam APBN selama tahun 2017-2021, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (Indeks Williamson) dan ketimpangan pendapatan antar provinsi (Indeks Gini) di Indonesia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan variabel anggaran belanja TKDD untuk melihat pengaruh atau dampaknya terhadap ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti masih ada variabel lainnya yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Periode penelitian adalah tahun 2017-2021, sehingga jika penelitian dilakukan pada periode yang berbeda, dapat memberikan hasil yang berbeda.

REFERENCES:

- Acconcia, A. and Monte, A. Del (1999) 'Regional development and public spending: the case of Italy', *Universita degli Studi di Napoli Federico II* (June 2014). Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.508.5280&rep=rep1&type=pdf>.
- Badan Pusat Statistik (2023) 'Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan)', *Www.Bps.Go.Id*, Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/3/realisasi-pengeluaran-negara->.
- Bappenas (2023a) Gini Ratio. Available at: <https://simreg.bappenas.go.id/home/datatampilchart/?idreg=2&idtgl=2023-09-0313:32:11&datapulau=0&dataprov=0&datakabu=>.
- Bappenas (2023b) Pilar Pembangunan Inklusif Bappenas. Jakarta. Available at: <https://inklusif.bappenas.go.id/index>.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2021) Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2017-2021, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. CV Surya Lestari.
- Firdaus, M. (2013) 'Orasi Ilmiah Guru Besar IPB: Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif Orasi Ilmiah'.
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S. and Rahmadi, S. (2018) 'Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia)', *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), pp. 111–126. doi: 10.22437/pdpd.v7i3.6903.
- Kemenkeu (2015) 'Budget in Brief APBN 2015', *Kementrian Keuangan RI*.
- Muchaqqi, A., Halkis, M. and Mundayat, A. A. (2019) 'Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus Di Kawasan Muara Angke) the Impact of Social Economic Inequality on the Sishankamrata (Case Study in Muara Angke)', *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(2), pp. 245–275.
- Mukaramah-Harun, Zakariah, A. R. and Azali, M. (2012) 'Constructing a social accounting matrix framework to analyse the impact of public expenditure on income distribution in Malaysia', *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 46(2), pp. 63–83.
- Nasution, M. (2020) 'Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya Dengan Belanja Pemerintah: Studi Di Indonesia Inequality between Regions & Their Relationship with Government Expenditures: A Study in Indonesia', 5(2), p. 2020.
- Riani, W. (2016) 'Keterbatasan Indeks Gini sebagai Ukuran Ketimpangan Pendapatan dan Solusi Metoda Alternatif', *Prosiding Semnas Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 6(1), pp. 708–715. Available at: <http://www.aktual.com/bappenas-rasio-gini-desember-2015-turun-ke-0408/>.
- Rodani, A. (2023) Manfaat Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Nasional. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15765/Manfaat-Alokasi-Dana-Bagi-Hasil-DBH-dan-Implementasi-Desentralisasi-Fiskal-Dalam-Rangka-Pemerataan-Pembangunan-Nasional.html>.
- Sjafrizal. (2018) Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers.
- Tvonenews.com (2023) 'Demo di DPR, APDESI Bawa 13 Tuntutan_ Masa Jabatan Kades Ditambah hingga Dana Desa Dinaikan'. Jakarta. Available at: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/135144-demo-di-dpr-apdesi-bawa-13-tuntutan-masa-jabatan-kades-ditambah-hingga-dana-desa-dinaikan>.
- Widaryono, A. (2017) *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.